LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR WELERI MAKMUR
TAHUN 2022

BPR WM

Senantiasa Tepercaya Melayani Anda

JL. MAJAPAHIT, RUKO GAYAMSARI NO. 17-20 SEMARANG

TELP. 024 6733325, FAX. 024 6723588

www.bprwm.co.id

KATA PENGANTAR

PT BPR Weleri Makmur, selanjutnya cukup disebut BPR WM selalu berupaya menyempurnakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan pada seluruh tingkatan organisasi. Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan komponen penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan *(stakeholders)* dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat.

BPR WM telah beroperasi lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah keterbukaan *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)*, independensi *(independency)* dan kewajaran *(fairness).*

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap aktivitas operasional akan semakin meneguhkan komitmen untuk mewujudkan BPR WM menjadi BPR terbaik yang berperan penting dalam mengembangkan perekonomian Jawa Tengah, dengan senantiasa:

1. Memahami berbagai kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat;
2. Membangun sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integritas tinggi;
3. Menumbuhkembangkan dan menjaga kepercayaan semua *stakeholders* melalui kebijakan yang *prudent*, transparan dan komunikasi yang terbuka; dan
4. Mengembangkan, menyempurnakan, dan mensinergikan segala bidang terkait untuk mencapai nilai tambah yang optimal dan hasil yang terbaik.

Dalam menerapkan Tata Kelola yang baik, BPR WM selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek penerapan Tata Kelola yang baik, meliputi: Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil Penerapan Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi instisari sekaligus fokus BPR WM dalam mewujudkan Tata Kelola yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 3
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola 3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 7
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 9
B. Kepemilikan Saham Direksi 9
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Weleri Makmur 9
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain 9
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR Weleri Makmur ... 9
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR Weleri Makmur 9
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR Weleri Makmur 10
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris 10
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Weleri Makmur 10
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain 10
E. Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga Antar Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham 10
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris 10
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris 11
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris 11
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS 11
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS 11
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah 12
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 12
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun 12
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris 12
I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) 13
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi 13
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 14
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik 14

BAB III HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA 15
A. Ringkasan Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola 15
B. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola 17

BAB I

PENDAHULUAN

BPR WM memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan Tata Kelola sesuai standar yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar BPR WM dapat terus tumbuh berkelanjutan secara wajar menjadi BPR terbaik yang berperan penting dalam mengembangkan perekonomian Jawa Tengah.

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, BPR WM senantiasa memerhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank *(prudential banking principle*). Hal tersebut sudah menjadi kebutuhan BPR WM untuk selalu patuh pada peraturan perundang-undangan, memerhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum dan melaksanakan kegiatan usaha yang berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam menerapkan Tata Kelola, BPR WM berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola, meliputi:

a. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat;
d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; dan
e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola pada BPR WM bertujuan, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja. Penerapan Tata Kelola dalam segala aktivitas sejalan dengan visi, misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan.
2. Menjaga kegiatan operasional agar selalu patuh pada setiap ketentuan intern maupun ekstern serta ketentuan perundang-undangan.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan *(stakeholders).*
4. Memperkuat budaya organisasi.
5. Mengelola sumber daya secara efektif dan efisien.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola yang dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	**Nama : Kerry Thamrim**
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR WM. 2. Mengelola BPR WM sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. 3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Merealisasikan pencapaian semua target-target perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis. 5. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. 7. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan. 8. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional. 9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai peraturan perundang-undangan. 10. Mengungkapkan kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 11. Menyediakan data/informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh kepada Dekom. 12. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	13. Memutuskan setiap kebijakan strategis melalui rapat Direksi dengan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. 14. Mengungkapkan kepemilikan saham di BPR WM dan perusahaan lain serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham dalam rangka memenuhi aspek transparansi Direksi. 15. Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM. 16. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM, selain yang telah ditetapkan oleh RUPS. 17. Mengungkapkan remunerasi dan fasiltas yang diterima dalam Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM.
2.	**Nama : Hendrardi**
	Jabatan : Direktur Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR WM telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. 2. Memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain. 3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR WM tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 4. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR WM terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada OJK dan otoritas lain. 5. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatiihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 6. Melaporkan kepada Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai. 7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi. 8. Mencegah Direksi untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
3.	**Nama : Kasmiati**
	Jabatan : Direktur Operasional
	Tugas dan tanggung jawab: 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional BPR WM. 2. Menerapkan Tata Kelola pada setiap aktivitas operasional BPR WM. 3. Merealisasikan pencapaian target operasional BPR WM. 4. Menumbuhkan dan mewujudkan budaya kepatuhan pada kegiatan operasional; 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas operasional kepada Direktur Utama; 8. Menyediakan data/informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; 9. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi; 10. Mengungkapkan kepemilikan saham di BPR WM dan perusahaan lain serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham dalam rangka memenuhi aspek transparansi Direksi; 11. Tidak menggunakan BPR WM untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR WM; 12. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR WM, selain yang telah ditetapkan oleh RUPS; 13. Mengungkapkan remunerasi dan fasiltas yang diterima dalam Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Rekomendasi Dewan Komisaris	Tindak Lanjut Direksi
Triwulan I 2022 1. Rasio NPL bruto sebesar 9,22%, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam penanganan kredit-kredit bermasalah agar dapat menurunkan NPL. 2. Pencapaian laba usaha sebesar 91,55% dari anggaran yang telah ditetapkan, maka perlu mendapat perhatian agar laba usaha dapat tercapai sesuai anggaran yang ditetapkan.	**Triwulan I 2022** 1. Penyelesaian kredit NPL, PH, dan AYDA terus diupayakan secara intensif dan maksimal melalui meeting koordinasi dengan seluruh bagian monitoring setiap bulannya. Kebijakan menghapus denda dan sebagian bunga tetap dilakukan dan cukup efektif dalam pelunasan kredit bermasalah. Penilaian terhadap kelayakan debitur restrukturisasi khususnya restruktur Covid-19 dilakukan setiap bulan secara menyeluruh. 2. Laba usaha belum mencapai target yang telah dianggarkan, yaitu disebabkan adanya kenaikan NPL yang diakibatkan tidak diperpanjangnya restrukturisasi Covid-19 terhadap beberapa nasabah, sehingga berpengaruh terhadap kenaikan beban pencadangan kredit bermasalah atau PPAP.
Triwulan II 2022 1. Pada akhir triwulan II 2022, NPL bruto sebesar 10,78%, perlu mendapat perhatian khusus oleh manajemen dalam menyelesaikan kredit bermasalah. 2. Pencapaian laba usaha sebesar 68.17%, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari manajemen agar dapat mencapai target laba sesuai anggaran yang ditetapkan.	**Triwulan II 2022** 1. Penyelesaian kredit NPL, PH, dan AYDA terus diupayakan secara intensif dan maksimal melalui meeting koordinasi dengan seluruh bagian monitoring setiap bulannya. Kebijakan menghapus denda dan sebagian bunga tetap dilakukan dan cukup efektif dalam pelunasan kredit bermasalah. Penilaian terhadap kelayakan debitur restrukturisasi khususnya restruktur Covid-19 dilakukan setiap bulan secara menyeluruh. 2. Restrukturisasi Covid-19 pada beberapa debitur tidak lagi dilakukan perpanjangan, sehingga memicu kenaikan NPL dan diikuti pembentukan beban pencadangan kredit bermasalah yang meningkat, sehingga mengurangi laba usaha hingga Triwulan II 2022.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
	Rekomendasi Dewan Komisaris	**Tindak Lanjut Direksi**
	Triwulan III 2022 1. Agar segera menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Umum OJK posisi 31 Mei 2022, diantaranya perbaikan pada program bantu Monitoring Online. 2. Dalam penyaluran kredit agar tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, supaya menjadi langkah mitigasi risiko kredit bermasalah, sehingga dapat tencapai kredit dengan kualitas yang sehat. 3. Meningkatkan pencapaian laba usaha, hingga Triwulan III tahun 2022 laba usaha baru mencapai 67,62% dari anggaran yang telah ditetapkan.	**Triwulan III 2022** 1. Perbaikan program bantu Monitoring Online masih proses pengerjaan, targetnya selesai pada akhir bulan Desember 2022. 2. Upaya penyelesaian kredit NPL, PH, dan AYDA terus dilakukan secara intensif dan maksimal, yaitu melalui meeting koordinasi penyelesaian kredit bermasalah dengan seluruh bagian monitoring setiap bulannya agar dapat meningkatkan pendapatan bank guna mencapai target laba usaha yang telah ditentukan. 3. Tidak tercapainya laba usaha disebabkan adanya kenaikan NPL sebagai akibat dari tidak diperpanjangnya restrukturisasi Covid-19, sehingga beban pencadangan kredit bermasalah atau PPAP ikut meningkat dan mempengaruhi pertumbuhan laba usaha hingga Triwulan III 2022.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1	**Nama**	:	**Djoko Sumarno**
	Jabatan	:	**Komisaris Utama**
2	**Nama**	:	**Yenny Basuki**
	Jabatan	:	**Komisaris**
3	**Nama**	:	**Gianto Darmawan**
	Jabatan	:	**Komisaris Independen**

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR WM di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR WM.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	5. Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai operasional BPR WM, kecuali: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya. 7. Wajib memberitahukan kepada OJK mengenai: a. Pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b. Keadaan/perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 8. Memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris. 9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas secara optimal. 10. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan 11. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai suatu permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional melalui rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi.
	Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi: **Triwulan I 2022** 1. Rasio NPL bruto sebesar 9,22%, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam penanganan kredit-kredit bermasalah agar dapat menurunkan NPL. **2.** Pencapaian laba usaha sebesar 91,55% dari anggaran yang telah ditetapkan, maka perlu mendapat perhatian agar laba usaha dapat tercapai sesuai anggaran yang ditetapkan. **Triwulan II 2022** 1. Pada akhir triwulan II 2022, NPL bruto masih berada pada posisi 10,78%, perlu mendapat perhatian khusus oleh manajemen dalam menyelesaikan kredit bermasalah. 2. Pencapaian laba usaha sebesar 68.17%, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari manajemen agar dapat mencapai target laba sesuai anggaran yang ditetapkan. **Triwulan III 2022** 1. Agar segera menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Umum OJK posisi 31 Mei 2022, yaitu perbaikan pada program bantu Monitoring Online. 2. Dalam penyaluran kredit agar tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, supaya menjadi langkah mitigasi risiko kredit bermasalah, sehingga dapat tencapai kredit dengan kualitas yang sehat. 3. Meningkatkan pencapaian laba usaha, hingga Triwulan III tahun 2022 laba usaha baru mencapai 67,62% dari anggaran yang telah ditetapkan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diantaranya mengatur bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, serta dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Posisi modal inti BPR WM belum mencapai Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) maka sesuai POJK Tata Kelola tersebut, BPR WM belum wajib membentuk Komite-Komite sebagaimana dimaksud.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR WM

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Kepemilikan
1	Kerry Thamrim	3.524.000.000	5.03%
2	Hendrardi	-	-
3	Kasmiati	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Kepemilikan
1	Kerry Thamrim	600787 -	1. PT BPR Mandiri Artha Abadi 2. PT Multi Karya Mitra Sentosa 3. CV. Mitra Karya Abadi	10% 10% 12,5%
2	Hendrardi	-	-	-
3	Kasmiati	-	-	-

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR WM

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR WM

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kerry Thamrim	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Hendrardi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Kasmiati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR WM

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Direksi Lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kerry Thamrim	Tidak Ada	Tidak Ada	Tan Udjan Sugiarto - Ayah Mertua, Hengky Tanto Sugiarto - Kakak Kandung Istri, Tan Dewi Puspa - Istri
2	Hendrardi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Kasmiati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Kepemilikan
1	Djoko Sumarno	-	-
2	Yenny Basuki	7.492.000.000	10.70%
3	Gianto Darmawan	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank	Nama Perusahaan Lain	Kepemilikan
1	Djoko Sumarno	-	-	-
2	Yenny Basuki	-	-	-
3	Gianto Darmawan	-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR WM

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djoko Sumarno	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yenny Basuki	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Gianto Darmawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR WM

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djoko Sumarno	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yenny Basuki	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Gianto Darmawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	543.600.000	3	199.560.000
2	Tunjangan	3	1.407.358.568	3	437.690.908
3	Tantiem	3	-	3	-
4	Kompensasi berbasis saham	3	-	3	-
5	Remunerasi lainnya	3	-	3	-
Total		[redacted]	1.950.958.568	[redacted]	637.250.908

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis fasilitas lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil Dinas, 1 (satu) unit setiap orang	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Asuransi kesehatan dan BPJS	Asuransi kesehatan dan BPJS
4	Fasilitas Lainnya a. Komunikasi b. Natura	 Kuota pulsa dan data Pakaian seragam	 Tidak Ada Pakaian seragam

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) dan gaji Dewan Komisaris terendah (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	6 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	18 April 2022	3 (tiga) orang	1. Pengawasan pencapaian target Rencana Bisnis 2. Bahasan isu strategis dan kebijakan 3. Evaluasi kinerja keuangan 4. Rekomendasi
2	08 Agustus 2022	3 (tiga) orang	1. Pengawasan pencapaian target Rencana Bisnis 2. Bahasan isu strategis dan kebijakan 3. Evaluasi kinerja keuangan 4. Rekomendasi
3	28 Oktober 2022	3 (tiga) orang	1. Pengawasan pencapaian target Rencana Bisnis 2. Bahasan isu strategis dan kebijakan 3. Evaluasi kinerja keuangan 4. Rekomendasi
4	09 Desember 2022	7 (tujuh) orang	Rapat Bersama Direksi dan Kepala SKKMR membahas Rencana Bisnis Tahun 2023.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingakat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Djoko Sumarno	4	0	100%
2	Yenny Basuki	4	0	100%
3	Gianto Darmawan	4	0	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal *(Internal Fraud)*

Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total *Fraud*	0	0	0	0	0	0	1	0
Telah Diselesaikan	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0

Pada tahun 2022 tidak terdapat penyimpangan internal.

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	23	-
Dalam Proses Penyelesaian	2	-
Total	25	-

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR WM selama tahun 2022 sejumlah 25 (dua puluh lima) perkara, semuanya perkara perdata. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 (dua puluh tiga) perkara atau 92% telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap) dan terdapat 2 (dua) perkara yang masih dalam proses penyelesaian.

Klasifikasi permasalahan hukum perdata berdasarkan pokok perkara:

a. Perkara Wanprestasi sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara; dan
b. Perbuatan Melawan Hukum sebanyak 3 (tiga) perkara.

Dari jumlah permasalahan hukum tersebut poisisi BPR WM sebagai:

a. Pihak penggugat sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara; dan
b. Pihak tergugat sebanyak 3 (tiga) perkara.

Posisi BPR WM sebagai penggugat dalam Gugatan Sederhana untuk perkara-perkara wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rp)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
Nihil							

Pada tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2022 tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dengan nominal paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	10 Juli 2022	Sosial	Pemberian hewan qurban	1. Masjid Al Ikhlas Tembalang 2. Masjid Nurul Huda Karangayu	Rp6.400.000
2	10 Juli 2022	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Al hidayah Weleri	Rp3.700.000
3	10 Juli 2022	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Al Falaq Kadipiro Sragen	Rp3.300.000
4	10 Juli 2022	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Al Mukhayat Klaten	Rp3.750.000
5	10 Juli 2022	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Nurul Muttaqin Kudus	Rp3.750.000
6	10 Juli 2022	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Al Ikhlas Tegal	Rp3.550.000
7	10 Juli 2022	Sosial	Pemberian hewan qurban	Masjid Al Hikmah Surakarta	Rp3.500.000
8	05 Des 2022	Sosial	Santunan anak yatim	Panti Kyai Ageng Fatah Semarang	Rp3.500.000
9	06 Des 2022	Sosial	Santunan anak yatim	Panti Al Husna Lestari Klaten	Rp1.000.000
10	06 Des 2022	Sosial	Santunan anak yatim	Panti Muhammadiyah Sragen	Rp1.050.000
11	06 Des 2022	Sosial	Santunan anak yatim	Panti Asuhan Aisyiyah Kudus	Rp1.000.000
12	06 Des 2022	Sosial	Santunan anak yatim	Yayasan Istiqamah Slerok Tegal	Rp1.250.000
13	06 Des 2022	Sosial	Santunan anak yatim	Panti Daarul Hadlonah Kendal	Rp1.000.000
14	06 Des 2022	Sosial	Santunan anak yatim	Panti AL-Khidmah Pati	Rp1.000.000
15	06 Des 2022	Sosial	Santunan anak yatim	Panti Aisyiyah Surakarta	Rp1.000.000

BAB III

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian yang terdiri atas:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
10. Rencana Bisnis; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil akhir penilaian sendiri penerapan Tata Kelola berupa peringkat komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

A. Ringkasan Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola

Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri atas 11 (sebelas) faktor sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola. Berikut merupakan ringkasan kertas kerja penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Tahun 2022:

No.	Kriteria/Indikator	∑ Nilai a	∑ Pertanyaan b	Bobot c	Hasil a : b x c
1	**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	6	6	50%	0,50
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	17	8	40%	0,85
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	12	5	10%	0,24
	Penjumlahan S + P + H				1,59
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 20%				**0,318**

No.	Kriteria/Indikator	∑ Nilai a	∑ Pertanyaan b	Bobot c	Hasil a : b x c
2	**Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**	11	9	50%	0,61
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	20	8	40%	1,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	2	1	10%	0,20
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)				1,81
	Penjumlahan S + P + H				**0,272**
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 15%				
3	**Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	0	1	50%	0,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	0	3	40%	0,00
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	0	1	10%	0,00
	Penjumlahan S + P + H				0,00
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 0%				**0,000**
4	**Penanganan Benturan Kepentingan**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	3	1	40%	1,20
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	1	10%	0,30
	Penjumlahan S + P + H				2,50
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 10%				**0,250**
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	13	5	50%	1,30
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	15	5	40%	1,20
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	9	3	10%	0,30
	Penjumlahan S + P + H				2,80
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 10%				**0,280**
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	10	5	50%	1,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	9	4	40%	0,90
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	8	4	10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H				2,10
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 10%				**0,210**
7	**Penerapan Fungsi Audit Ekstern**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	4	2	40%	0,80
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	5	2	10%	0,25
	Penjumlahan S + P + H				2,05
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 2,50%				**0,051**
8	**Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern**	5	3	50%	0,83
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	17	7	40%	0,97
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	6	2	10%	0,30
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)				2,11
	Penjumlahan S + P + H				**0,211**
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 10%				
9	**Batas Maksimum Pemberian Kredit**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	5	2	40%	1,00
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	3	2	10%	0,15
	Penjumlahan S + P + H				2,15
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 7,50%				**0,161**

No.	Kriteria/Indikator	∑ Nilai a	∑ Pertanyaan b	Bobot c	Hasil a : b x c
10	**Rencana Bisnis**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	6	3	50%	1,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	4	2	40%	0,80
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	2	1	10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H				2,00
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 7,50%				**0,150**
11	**Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan**				
	a. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S)	2	1	50%	1,00
	b. Proses penerapan Tata Kelola (P)	9	4	40%	0,90
	c. Hasil penerapan Tata Kelola (H)	4	2	10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H				2,10
	Total Penilaian Faktor dikalikan bobot 7,50%				**0,158**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Nilai Faktor	0.318	0.272	0.000	0.250	0.280	0.210	0.051	0.211	0.161	0.150	0.158	**2.100**
Predikat Komposit	**Baik**											

B. **Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola**

Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian penerapan Tata Kelola Tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan umum hasil penilaian penerapan Tata Kelola BPR WM sebagai berikut:

Kesimpulan Umum
Secara umum kami simpulkan bahwa hasil penilaian *self assessment* penerapan Tata Kelola BPR WM tahun 2022 sudah memadai dengan nilai komposit **2,100** peringkat komposit: **Baik**. BPR WM telah memenuhi dengan baik beberapa aspek penilaian Tata Kelola meliputi: Struktur dan Infrastruktur, Proses Penerapan, dan Hasil Penerapan.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM Tahun 2022 ini kami sampaikan dengan sebenarnya. Laporan Penerapan Tata Kelola ini beserta Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Semarang, 11 Januari 2023
BANK PERKREDITAN RAKYAT
WELERI MAKMUR,

Mengetahui dan
Menyetujui,

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WELERI MAKMUR SEMARANG

DJOKO SUMARNO
Komisaris Utama

KERRY THAMRIM
Direktur Utama

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022

BPR WM

Senantiasa Tepercaya Melayani Anda

JL. MAJAPAHIT, RUKO GAYAMSARI NO. 17-20 SEMARANG
TELP. 024 6733325, FAX. 024 6723588
www.bprwm.co.id

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola

BPR Weleri Makmur

Tahun 2022

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Nilai Faktor	0.318	0.272	0.000	0.250	0.280	0.210	0.051	0.211	0.161	0.150	0.158	**2.100**
Predikat Komposit	**Baik**											

Kesimpulan

Faktor 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kelemahan : Direksi telah mengomunikasikan kebijakan strategis kepegawaian, namun cakupannya belum menyeluruh.

Kekuatan : Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Faktor 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kelemahan : Hasil rapat Dekom telah dituangkan dalam risalah rapat, namun belum mencantumkan adanya *dissenting opinions*.

Kekuatan : Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada BPR lain, BPRS dan/atau Bank Umum.

Faktor 3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

BPR WM mempunyai modal inti kurang dari Rp80 miliar, belum wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Faktor 4 Penanganan Benturan Kepentingan

Kelemahan : Transaksi yang berpotensi terdapat benturan kepentingan belum secara tertib dilengkapi dengan dokumen pendukung pengungkapan atas benturan kepentingan.

Kekuatan : BPR WM telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan.

Faktor 5 Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kelemahan : Pemantauan dan reviu terhadap semua ketentuan intern belum dapat dilakukan secara tertib dan berkala.

Kekuatan : Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 6 Penerapan Fungsi Audit Intern

Kelemahan : Memiliki program rekruitmen dan pengembangan SDM secara umum, namun belum spesifik mengenai fungsi audit intern.

Kekuatan : Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kelemahan : Auditor Ekstern kurang memberi informasi mengenai kelemahan-kelemahan terkait pengendalian intern dan saran-saran perbaikannya.

Kekuatan : Auditor Ekstern (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah memenuhi legalitas sesuai ketentuan OJK.

Faktor 8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan : Penerapan manajemen risiko dalam berbagai aktivitas unit kerja masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Kekuatan : Satuan Kerja Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Faktor 9 Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kelemahan : Menghindari pemberian fasilitas kredit yang hampir menembus ketentuan BMPK.

Kekuatan : Bank tidak pernah melanggar dan/atau melampaui ketentuan BMPK.

Faktor 10 Rencana Bisnis BPR

Kelemahan : Pada Rencana Bisnis 2023 tidak terdapat rencana penambahan modal dari pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan.

Kekuatan : Rencana Bisnis 2023 telah dilaporkan sesuai ketentuan OJK.

Faktor 11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kelemahan : Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan *Core Banking System* sehingga masih perlu pengolahan data.

Kekuatan : Pelaporan keuangan dan non keuangan senantiasa tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR WELERI MAKMUR
Posisi : 31 Desember 2022

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.100	**Baik**
Analisis	
Secara umum kami simpulkan bahwa hasil penilaian *self assessment* penerapan Tata Kelola PT BPR Weleri Makmur tahun 2022 sudah memadai dengan nilai komposit **2,100** peringkat komposit: **Baik.** BPR WM telah memenuhi dengan baik beberapa aspek penilaian Tata Kelola meliputi: Struktur dan Infrastruktur, Proses Penerapan, dan Hasil Penerapan.	

Demikian kesimpulan umum hasil penilaian penerapan Tata Kelola BPR WM selama tahun 2022. Semoga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Semarang, 11 Januari 2023
BANK PERKREDITAN RAKYAT
WELERI MAKMUR,

Mengetahui dan
Menyetujui,

DJOKO SUMARNO
Komisaris Utama

KERRY THAMRIM
Direktur Utama

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Weleri Makmur Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berukut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR WM Tahun 2022 ini kami sampaikan dengan sebenarnya.

Semarang, 11 Januari 2023
BANK PERKREDITAN RAKYAT
WELERI MAKMUR,

Mengetahui dan
Menyetujui,

DJOKO SUMARNO
Komisaris Utama

KERRY THAMRIM
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Pelapor

PT. BPR Weleri Makmur

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505614-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600567-12012023095701

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

skkmr.bprwm@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-12 09:57:01

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

12/1/2023

12/1/23

12/1/23